

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis

Disertasi ini dikembangkan atas dasar landasan filosofi pendidikan pragmatisme. Pragmatisme menekankan pada pembelajaran yang berbasis pengalaman dan relevansi langsung dengan kehidupan nyata, yang sangat penting dalam konteks pendidikan vokasional seperti di SMK. Dewey (1916: 146) menyatakan bahwa “pendidikan harus melibatkan siswa dalam kegiatan yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Pendidikan seharusnya tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis, relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan berfokus pada pengalaman yang bermakna”. Selanjutnya ditegaskan bahwa “pengalaman langsung dan kegiatan praktis adalah dasar dari pembelajaran yang efektif, karena mereka membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata” (Dewey, 1916: 174).

Sejalan dengan pandangan Dewey, pragmatisme pendidikan fokus pada beberapa hal berikut ini: (1) pendidikan harus mencerminkan kehidupan nyata dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) menekankan pada pengembangan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja; (3) mendorong siswa untuk menjadi fleksibel dan inovatif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di dunia kerja; (4) mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis, yang sangat diperlukan di tempat kerja.

Lebih lanjut, Kolb (1984: 20-38) memberikan penjelasan rinci tentang siklus pembelajaran berbasis pengalaman, yakni: (1) terlibat langsung dalam suatu aktivitas atau pengalaman; (2) merenungkan pengalaman dan mengamati apa yang terjadi; (3) mengembangkan teori atau generalisasi berdasarkan refleksi; (4) menguji teori melalui pengalaman baru. Teori Kolb sangat cocok untuk pendidikan vokasional karena menekankan pembelajaran melalui melakukan dan refleksi, yang sejalan dengan sifat praktis dan langsung dari pelatihan vokasional. Siswa di SMK dapat memperoleh manfaat dari pendekatan ini karena membantu mereka

mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung, refleksi, pemahaman konseptual, dan penerapan praktis. Dengan demikian, siswa di SMK dapat memperoleh manfaat dari pendekatan ini karena membantu mereka mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung, refleksi, pemahaman konseptual, dan penerapan praktis.

B. Landasan Sistem Nilai

Di masa lalu, terdapat perdebatan mengenai apakah ilmu pengetahuan harus sepenuhnya bebas dari pengaruh nilai. Sebagian pihak berpendapat bahwa agar ilmu pengetahuan dapat menghasilkan kebenaran yang objektif, maka ia harus terlepas dari segala bentuk nilai. Dalam pandangan ini, nilai dianggap bukan sebagai sumber kekuatan, melainkan sebagai faktor yang dapat menghambat pencapaian kebenaran ilmiah. Namun, seiring waktu, kesadaran akan pentingnya nilai dalam kehidupan manusia semakin meningkat. Nilai memiliki peran sentral sebagai pedoman utama yang memberikan makna bagi kehidupan dan tindakan manusia (Sanusi, 2012).

Sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat sepenuhnya bebas nilai, karena pada dasarnya ia merupakan aktivitas manusia yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. Dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, individu secara tidak langsung menerima dan mengadopsi nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain, pengembangan ilmu pengetahuan selalu melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai. Oleh karena itu, anggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat benar-benar terbebas dari nilai hanyalah sebuah ilusi.

Selain landasan filosofis yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga didukung oleh sistem nilai dalam memahami manajemen SMK dalam meningkatkan daya saing lulusan. Penelitian ini berlandaskan pada sistem nilai yang terstruktur dan memiliki hierarki, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanusi (2017). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan utama dalam setiap langkah penelitian, membentuk suatu kerangka kerja yang sistematis dan relevan dengan konteks yang diteliti. Dengan demikian, sistem nilai tersebut memberikan

perspektif yang lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai dapat dikembangkan, diprioritaskan, dan diterapkan dalam pengelolaan sekolah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten serta memiliki daya saing tinggi. Dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sistem nilai ini tidak hanya berperan sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur keterkaitan antara berbagai nilai dalam penelitian ini, sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Enam Sistem Nilai

No	Sistem Nilai	Deskripsi	Contoh Dalam Pengembangan Manajemen SMK
1	Nilai Teologis	Berkaitan dengan keyakinan spiritual atau agama. Nilai ini menempatkan Tuhan atau kekuatan tertinggi sebagai sumber nilai dan panduan dalam kehidupan.	Pengintegrasian pendidikan agama dan moral dalam kurikulum untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia
2	Nilai Etis	Berhubungan dengan prinsip-prinsip moral yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam tindakan dan perilaku.	Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui tata tertib sekolah dan perilaku sehari-hari.
3	Nilai Estetis	Mengacu pada apresiasi terhadap keindahan dan seni. Nilai ini berkaitan dengan bagaimana manusia menghargai dan menciptakan sesuatu yang indah.	Pengembangan program seni dan budaya di sekolah yang mendorong kreativitas siswa, seperti pembuatan karya seni, musik, atau drama.
4	Nilai Logis	Berhubungan dengan pemikiran rasional dan logis. Nilai ini menekankan pentingnya akal dan penalaran dalam memahami dan menyelesaikan masalah.	Penerapan pendekatan berbasis sains dan teknologi dalam pembelajaran, seperti pengembangan proyek penelitian atau pemecahan masalah teknis di SMK.
5	Nilai fisik-fisiologis	Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia akan kesehatan dan kesejahteraan fisik. Nilai ini menempatkan pentingnya kesehatan tubuh dan kebugaran.	Implementasi program kesehatan dan kebugaran fisik melalui pendidikan jasmani dan olahraga yang teratur serta pendidikan gizi di sekolah.

No	Sistem Nilai	Deskripsi	Contoh Dalam Pengembangan Manajemen SMK
6	Nilai Teleologis	Terkait dengan tujuan akhir atau makna hidup. Nilai ini mengarahkan tindakan manusia menuju pencapaian tujuan yang lebih besar dan bermakna.	Perencanaan karier dan bimbingan konseling untuk membantu siswa merumuskan tujuan hidup dan karier mereka, serta mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.

1. Nilai Teologis

Nilai ini menempatkan kepercayaan terhadap Tuhan sebagai panduan utama dalam hidup. Dalam konteks pendidikan, ini berkaitan dengan pembentukan karakter spiritual siswa melalui pengajaran agama. Di SMK menyediakan pelajaran agama yang komprehensif dan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek pendidikan. Ini bisa termasuk doa sebelum memulai pelajaran atau pelajaran agama yang dikaitkan dengan etika profesional.

2. Nilai Etis

Fokus pada perilaku yang dianggap benar atau salah menurut norma sosial dan moral. Nilai ini penting dalam membangun integritas dan moralitas siswa. Di SMK mengintegrasikan etika profesional ke dalam kurikulum kejuruan, seperti kode etik profesi, serta mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja.

3. Nilai Estetik

Mengajarkan apresiasi terhadap keindahan dan seni, baik dalam bentuk fisik, ekspresi, maupun kreativitas. Di SMK dilakukan diantaranya melalui program ekstrakurikuler seni yang mendorong siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka, seperti seni rupa, musik, atau desain produk. Ini membantu siswa mengembangkan rasa estetika yang penting dalam banyak bidang kejuruan, seperti desain grafis atau fashion.

4. Nilai Logis

Menekankan kemampuan berpikir rasional dan kritis, yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat.

Di SMK dapat dilakukan melalui pelibatan siswa dalam proyek berbasis penelitian yang memerlukan analisis data, pemecahan masalah, dan penerapan teori ke praktik. Misalnya, siswa teknik bisa diajarkan bagaimana mendiagnosis masalah mesin menggunakan pendekatan logis dan metodologis.

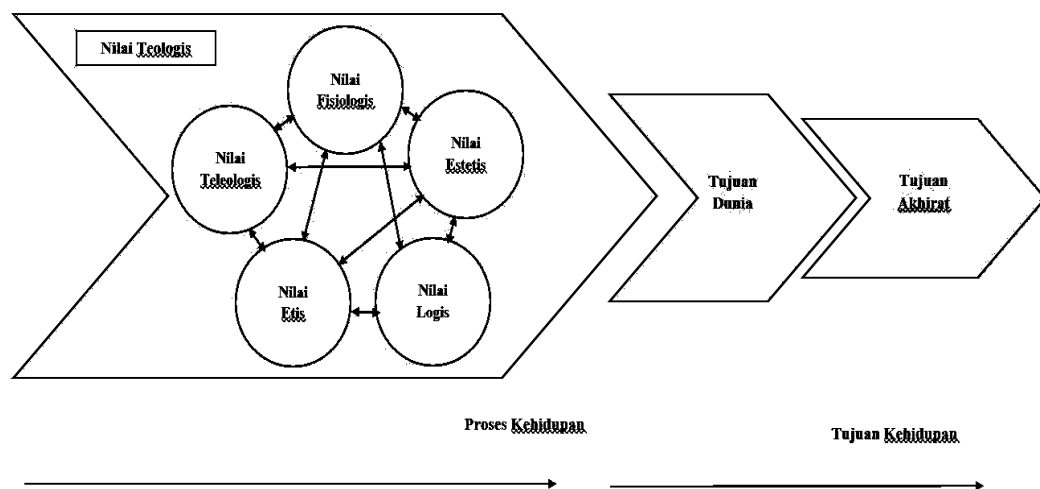
5. Nilai Fisik

Berhubungan dengan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Di SMK dilakukan melalui pelaksanaan program pendidikan jasmani yang tidak hanya melibatkan olahraga tetapi juga pendidikan kesehatan, termasuk nutrisi dan kebersihan pribadi, untuk memastikan bahwa siswa siap secara fisik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

6. Nilai Teleologik

Mengacu pada pemahaman dan perencanaan tujuan hidup jangka panjang, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Di SMK dilakukan melalui Bimbingan Karier yang sistematis, termasuk pengenalan terhadap berbagai jalur karier yang sesuai dengan bidang keahlian siswa, serta perencanaan pendidikan lebih lanjut atau pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Tantangan zaman modern menuntut kita untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Namun, dalam menghadapi perubahan yang begitu dinamis, kita perlu tetap berpegang pada nilai-nilai luhur sebagai landasan bertindak. Sebagaimana yang ditekankan oleh Sanusi (2012), nilai-nilai tersebut menjadi semacam jangkar yang menjaga kita agar tidak tersesat di tengah arus perubahan yang tak pasti. Adapun interelasi dari keenam nilai Achmad Sanusi tersebut sebagaimana gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Interelasi Enam Nilai Achmad Sanusi dalam Mencapai Tujuan Hidup

Dengan mengintegrasikan enam sistem nilai ini dalam pengelolaan SMK, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga menekankan pembentukan karakter serta pemahaman yang mendalam mengenai makna dan tujuan hidup. Pendekatan ini akan menjamin bahwa lulusan SMK tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, menunjukkan kreativitas, serta memiliki visi yang jelas dalam merancang masa depan mereka.

C. Landasan Teori dan Konsep

1. Landasan Teori

a. Teori *Total Quality Management (TQM)*, Dr. William Edward Deming

Dalam bukunya *Out of the Crisis* (1986), W. Edwards Deming memperkenalkan prinsip yang menjadi dasar penerapan *Total Quality Management (TQM)*. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan budaya kualitas yang berkelanjutan dalam suatu organisasi, termasuk dalam pendidikan vokasi. Siklus *PDCA (Plan, Do, Check, Act)*

merupakan alat manajemen kualitas yang juga dikembangkan oleh Deming untuk mendukung prinsip-prinsip *TQM*.

b. Teori Kepemimpinan Pendidikan, Bernard (2006)

Dalam edisi kedua bukunya *Transformational Leadership, 2nd ed.* (New Jersey: Mahwah, 2006), Bernard memperluas konsep yang diperkenalkan oleh James MacGregor Burns, dengan menekankan bahwa kepemimpinan transformasional bukan hanya tentang memberi inspirasi, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam organisasi. Bernard menjelaskan bagaimana pemimpin transformasional dapat meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja pengikutnya. Dengan kepemimpinan yang kuat, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan individu, sekolah dapat meningkatkan kualitas lulusannya agar lebih kompetitif di dunia kerja. Siklus *PDCA* menjadi alat yang efektif untuk mencapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam pendidikan vokasi.

c. Teori Manajemen Strategis, Porter (1980)

Dalam bukunya *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (1998), Michael E. Porter memperkenalkan lima kekuatan kompetitif (*Five Forces Framework*) yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks SMK yang berorientasi pada kesiapan kerja dan daya saing lulusan.

d. Teori Pengembangan Kompetensi, Spady (1994):

Dalam bukunya *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*, Spady, W. G. (1994) menyatakan bahwa *Outcome* adalah hasil yang kita harapkan untuk siswa tunjukkan pada akhir pengalaman belajar yang signifikan. Dengan kata lain, *outcome* adalah hasil belajar nyata. *Outcome* bukanlah sikap, keyakinan, nilai, atau keadaan pikiran seseorang. *Outcome* menunjukkan aplikasi nyata dari apa yang telah

mereka pelajari. Outcome adalah apa yang benar-benar dapat dilakukan siswa menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Ini berarti bahwa outcome terdiri dari tindakan (*act*) dan penampilan (*performance*). Tindakan dan penampilan mewujudkan dan mencerminkan kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan konten, informasi, ide, dan alat belajar dengan sukses.

e. Teori Manajemen Kualitas, Deming (1986)

Masih dalam bukunya *Out of the Crisis* (1986), W. Edwards Deming menyatakan bahwa *TQM* berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus dalam seluruh aspek organisasi, termasuk pendidikan. *TQM* mendorong pengelolaan sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang berfokus pada kepuasan *stakeholder* (siswa, orang tua, dan masyarakat), yang sejalan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat, cerdas, dan berdaya saing.

f. Model Manajemen Berbasis Kompetensi, Mulyasa (2002)

Mulyasa (2002) pada buku *Manajemen Berbasis Kompetensi* menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan yang berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta didik, dengan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan siklus *PDCA* (*Plan-Do-Check-Act*) yang dapat diterapkan di SMK untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

g. Daya Saing SMK Dalam Bursa Pasar Kerja 4,0 (Kemdikbud, 2019):

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan industri. Sebagai jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, SMK harus menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas SDM. Daya saing dalam dunia pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu sistem yang saling terhubung dan berkesinambungan.

Kualitas pendidikan harus dikaji berdasarkan tiga aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Suatu input pendidikan dianggap berkualitas jika memiliki kesiapan untuk menjalani proses pembelajaran. Sementara itu, proses pendidikan dikatakan berkualitas apabila mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Sedangkan, output pendidikan dianggap unggul apabila peserta didik mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang tinggi. Kualitas dan daya saing yang optimal dalam pendidikan memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan dan dunia industri.

2. Konsep Dasar

a. Definisi Manajemen

Menurut Terry, G. R. (2017) dalam bukunya *Principles of Management*, manajemen merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian berbagai sumber daya, seperti manusia, keuangan, material, dan informasi, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2016) dalam buku *Management* mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian terhadap upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Meskipun para ahli memiliki perspektif yang beragam dalam mendefinisikan manajemen, terdapat kesepakatan bahwa manajemen melibatkan keterampilan tertentu yang harus dikuasai. Dalam pelaksanaannya, manajemen mencakup beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh seorang pemimpin atau manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, kepemimpinan, serta pengendalian terhadap berbagai

aktivitas dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen juga sering dipahami sebagai seni dalam mencapai tujuan melalui kerja sama dengan orang lain.

b. Definisi Pendidikan

Dalam terminologi pendidikan, pendidikan diartikan sebagai suatu proses memanusiakan manusia muda dan mengangkat mereka ke taraf yang lebih tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi sosial serta kemampuan individu secara optimal (Driyarkara, 1980).

c. Konsep Manajemen Pendidikan.

Oteng Sutisna (1989: 382) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan memiliki tiga bidang utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Konteks Administrasi Pendidikan, yang meliputi faktor-faktor eksternal seperti geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan.
- 2) Pendidikan sebagai Bidang Garapan Administrasi, yang mencakup peran administrasi dalam pengelolaan pendidikan.
- 3) Substansi Administrasi Pendidikan, yang meliputi tugas, proses, prinsip, serta perilaku dalam administrasi pendidikan.

Hal ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan memiliki cakupan yang luas dan saling berhubungan, sehingga pemahaman terhadapnya membutuhkan wawasan yang komprehensif serta kesiapan dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pemahaman terhadap manajemen pendidikan juga perlu disertai dengan pendalaman terhadap perkembangan teori manajemen agar dapat diterapkan secara optimal dalam sistem pendidikan.

d. Manajemen Sebagai Landasan Pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengintegrasikan berbagai sumber daya pendidikan guna terfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Made

Pidarta, 1998: 4). Tujuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu tujuan makro dan mikro.

Tujuan makro berkaitan dengan tujuan pendidikan secara global, mencakup semua individu, dan mengarah pada tujuan nasional. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan pendidikan nasional telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi dalam mengembangkan potensi individu serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen yang baik.

Sedangkan tujuan mikro mengacu pada tujuan pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan tertentu, tempat berlangsungnya praktik pembelajaran. Oleh karena itu, manajemen menjadi dasar yang penting dalam pendidikan, karena:

- 1) Manajemen pendidikan melibatkan kerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Manajemen pendidikan mencerminkan suatu proses yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 3) Manajemen pendidikan dapat dianalisis menggunakan perspektif sistem.
- 4) Manajemen pendidikan dapat dikaji dari aspek kepemimpinan.
- 5) Manajemen pendidikan juga dapat ditinjau dari sudut pandang komunikasi.

Manajemen difokuskan pada kegiatan atau proses kerja, bukan sebagai individu, sehingga selaras dengan konsep administrasi yang menempatkan administrator sebagai pelaksananya. Dalam konteks

pendidikan, supervisi memiliki makna yang serupa, namun harus disesuaikan dengan berbagai aktivitas pembelajaran (Sahertian, 1981: 18, dikutip dalam Uus, dkk., 2009: 147).

e. Fungsi Manajemen Pendidikan Melalui Pendekatan *TQM*

Manajemen pendidikan yang menerapkan pendekatan *Total Quality Management (TQM)* memiliki fungsi utama dalam meningkatkan kualitas di seluruh aspek organisasi dengan melibatkan semua elemen di dalamnya. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada SMK, penerapan *TQM* bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.

1) *Plan* (Perencanaan).

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam setiap tindakan. Kegagalan dalam perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, pendidikan juga memerlukan perencanaan yang matang guna memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menjadi fungsi pertama dalam manajemen dan akan mempengaruhi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Hasibuan (2007: 93) menekankan pentingnya perencanaan dengan beberapa alasan berikut:

- a) Tanpa adanya perencanaan dan rencana yang jelas, maka tujuan tidak dapat dicapai.
- b) Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan akan kehilangan pedoman sehingga berisiko terjadi pemborosan sumber daya.
- c) Rencana menjadi dasar pengendalian; tanpa rencana, maka pengendalian tidak dapat dijalankan secara efektif.
- d) Tanpa adanya perencanaan, tidak akan ada keputusan yang sistematis, dan proses manajemen pun tidak dapat berlangsung.

Philip H. Combs mengemukakan lima karakteristik utama dalam perencanaan pendidikan, yaitu:

- a) Perencanaan pendidikan harus memiliki orientasi jangka panjang.
- b) Perencanaan pendidikan harus disusun secara rinci.
- c) Perencanaan pendidikan harus terintegrasi dengan

kebijakan ekonomi yang lebih luas serta perkembangan sosial masyarakat. d) Perencanaan pendidikan harus menjadi bagian integral dalam sistem pengelolaan pendidikan. e) Perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan aspek kualitas, karena perkembangan pendidikan tidak hanya sebatas pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga peningkatan kualitas (Afifuddin, 2004: 49).

Implementasi di SMK diantaranya melalui kegiatan kepala sekolah dan tim manajemen merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, menetapkan standar kompetensi yang jelas, dan merencanakan program pelatihan untuk guru (Dale H. Besterfield, 2010: 95).

2) *Do* (Pelaksanaan)

Tahap ini melibatkan implementasi rencana yang telah dibuat, termasuk pelaksanaan kurikulum, program pelatihan, dan metode pembelajaran.

Implementasi di SMK diantaranya guru melaksanakan kurikulum yang telah dirancang, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk praktek langsung (James R. Evans, 2013).

3) *Check* (Pemeriksaan)

Pada tahap ini, hasil dari implementasi rencana dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan standar kualitas terpenuhi (Blanchard, K, 2018: 307). Implementasi di SMK diantaranya melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui tes kompetensi, observasi kelas, dan feedback dari siswa serta industri. Analisis data hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan program yang telah diterapkan.

4) *Act* (Tindakan)

Berdasarkan hasil evaluasi, tindakan korektif dan perbaikan dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan (Deming, 1982; Juran, 1999; Feigenbaum, 1991).

Implementasi di SMK dilakukan dengan merujuk kepada feedback dan hasil evaluasi, kepala sekolah dan tim manajemen melakukan penyesuaian pada kurikulum, metode pengajaran, dan program pelatihan guru. Perbaikan ini memastikan bahwa program pendidikan tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa.

Manajemen pendidikan adalah proses mengintegrasikan berbagai sumber daya pendidikan secara terarah guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya (Made Pidarta, 1998:4).

3. Pendidikan Di SMK

a. Pengertian SMK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan pada jenjang menengah yang berfokus pada pembelajaran keterampilan teknis dan kejuruan. Tujuan utama pendidikan di SMK adalah membekali siswa dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di bidang tertentu. Definisi mengenai SMK dapat ditemukan dalam berbagai sumber, baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMK adalah institusi pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar. Tujuan dari SMK adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidang tertentu, serta memberikan bekal akademik dan pengembangan kompetensi agar mereka siap memasuki dunia kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuswana (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah jenjang pendidikan menengah yang berorientasi pada persiapan peserta didik untuk bekerja dalam bidang spesifik. Selanjutnya, Djojonegoro (dalam Yoto dkk., 2013) menegaskan bahwa pendidikan kejuruan merupakan strategi dalam menciptakan tenaga kerja tingkat

menengah. Utami dan Hudaniah (2013) juga menyatakan bahwa SMK bertujuan memberikan keterampilan khusus kepada siswa agar dapat langsung terjun ke dunia kerja.

Dalam konteks internasional, beberapa institusi memberikan definisi tentang pendidikan kejuruan. UNESCO, melalui Technical and Vocational Education and Training (TVET), menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan adalah bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan praktis dan teknis yang dibutuhkan dalam berbagai profesi. Sementara itu, Cedefop—melalui konsep Vocational Education and Training (VET)—menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan pekerjaan tertentu maupun secara lebih umum di pasar tenaga kerja. OECD juga menekankan bahwa pendidikan kejuruan berfokus pada pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*), di mana SMK atau vocational schools menawarkan program yang mengajarkan keterampilan praktis dan teori yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMK adalah institusi pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan membekali mereka keterampilan teknis serta pengetahuan praktis. Meskipun penerapan pendidikan kejuruan dapat berbeda di setiap negara, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Hubungan erat antara pendidikan kejuruan dan industri menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem pendidikan ini.

Durasi pendidikan di SMK bervariasi, tergantung pada program keahlian yang dipilih. Terdapat program pendidikan dengan masa belajar tiga tahun dan empat tahun, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsentrasi keahlian masing-masing sekolah. Sejak awal masuk SMK,

calon peserta didik harus memilih konsentrasi keahlian yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah yang dipilih.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK diatur melalui kebijakan pemerintah daerah. Di Jawa Barat, misalnya, pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat (Pergub Jabar) No. 9 Tahun 2024. PPDB dilakukan secara daring dengan beberapa jalur seleksi, yaitu: (1) Zonasi; (2) Perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; (3) Prestasi akademik dan non-akademik; (4) Afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu; (5) Afirmasi bagi penyandang disabilitas dan anak berbakat Istimewa; dan (6) Jalur persiapan kelas industri.

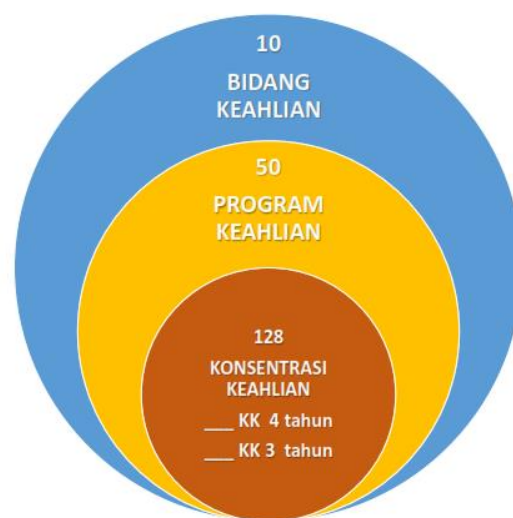
Khusus untuk PPDB jalur persiapan kelas industri, terdapat beberapa ketentuan tambahan, yaitu:

- 1) Hanya sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) yang dapat membuka kelas industri.
- 2) Proses seleksi kelas industri dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PPDB online atau melalui uji kompetensi khusus.
- 3) Beberapa kelas industri menawarkan program rekrutmen langsung bagi siswa yang lulus, tergantung pada kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri terkait serta kesepakatan kerja sama dengan sekolah.

b. Spektrum Keahlian SMK

Mengingat luasnya bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh lulusan SMK, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Spektrum Keahlian SMK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 244/M/2024, spektrum keahlian di SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dalam Kurikulum Merdeka mencakup: (1) 10 Bidang Keahlian; (2) 50 Program Keahlian; (3) 128 Konsentrasi Keahlian.

Setiap peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan konsentrasi keahlian yang mereka pilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Konsentrasi Keahlian SMK ditunjukkan pada gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2. 2 Spektrum Keahlian SMK

c. Kurikulum dan pembelajaran di SMK

Sejalan dengan pengertian SMK yang merupakan lembaga pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan teknis, kurikulum SMK dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, sehingga materi yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri.

SMK menerapkan Kurikulum yang dirancang untuk memastikan siswa menguasai keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri melalui program *link & match* dengan IDUKA. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia kerja melalui kemitraan dengan perusahaan. Suryani, N & Purwanto, A (2019)

menyatakan “Pembelajaran berbasis proyek di SMK dapat meningkatkan keterampilan praktis siswa serta kemampuan problem-solving dan kreativitas”.

Pada tingkat negara maju, pendidikan kejuruan mendapatkan dukungan serta arahan dari berbagai organisasi internasional. OECD (2018) dalam *"Learning for Jobs: OECD Reviews of Vocational Education and Training"* menyatakan bahwa mutu pendidikan kejuruan sangat bergantung pada dua faktor utama: pertama, penerapan sistem pendidikan ganda yang mengombinasikan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman kerja langsung di industri; kedua, kualitas program magang yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan industri yang sesuai.

Sementara itu, Cedefop (2015) dalam *"Vocational Education and Training in Europe"* menyoroti tiga elemen kunci dalam pembelajaran berkualitas di SMK. Pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar relevansi pendidikan tetap terjaga. Kedua, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan profesional berkelanjutan diperlukan agar mereka mampu mengajarkan keterampilan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan praktik industri. Ketiga, metode pembelajaran harus berorientasi pada siswa, dengan menekankan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran.

Selain itu, ILO (2017) dalam *"Skills and Jobs Mismatch in Low-and Middle-Income Countries"* menekankan dua aspek penting dalam pendidikan kejuruan. Pertama, pelatihan berbasis kompetensi (*Competency-Based Training/CBT*) yang fokus pada penguasaan keterampilan spesifik dan terukur. Kedua, kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-Private Partnerships/PPP*) dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan kejuruan yang berkualitas.

Dengan demikian, pendidikan kejuruan yang berkualitas membutuhkan berbagai komponen yang mendukung efektivitas dan relevansinya. Komponen-komponen tersebut mencakup kurikulum yang

sesuai dengan kebutuhan industri, pelatihan berbasis kompetensi, program magang yang berkualitas, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan profesional, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, serta kolaborasi antara sekolah dan industri. Penerapan unsur-unsur ini telah terbukti dapat meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing lulusan SMK di berbagai negara.

Selain mendapatkan pembelajaran di sekolah melalui teori dan praktik, siswa juga diberikan kesempatan untuk menjalani praktik kerja lapangan (PKL), sehingga mereka memperoleh pengalaman kerja langsung. Di tingkat akhir pendidikan (kelas XII atau XIII), siswa SMK diwajibkan mengikuti Ujian Kompetensi dengan beberapa pilihan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Diselenggarakan oleh sekolah dengan mendatangkan asesor dari dunia industri dan dunia kerja (IDUKA) mitra SMK.
- 2) Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Level 1 (LSP-P1).
- 3) Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 (LSP-P2).
- 4) Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Level 3 (LSP-P3).

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, berikut adalah penjelasan masing-masing jenis LSP:

- 1) LSP P1: a) Fokus pada bidang keahlian yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan atau pelatihan terkait; b) digunakan untuk sertifikasi internal di lembaga pendidikan atau perusahaan tertentu.
- 2) LSP P2: a) Terbatas pada bidang profesi yang berhubungan dengan asosiasi atau organisasi profesi; b) melayani sertifikasi bagi anggota asosiasi profesi tersebut.
- 3) LSP P3: a) Memiliki cakupan sertifikasi yang lebih luas, mencakup berbagai bidang dan profesi; b) terbuka untuk masyarakat umum dan mengeluarkan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional.

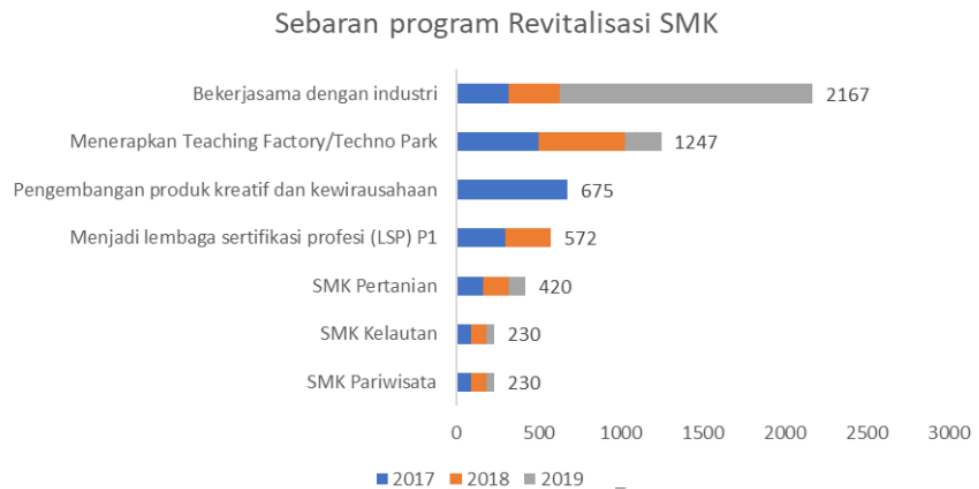
d. Revitalisasi SMK

Pada periode 2015-2019, salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pendidikan adalah meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran serta perbaikan dalam hasil pendidikan dan pelatihan. Fokus utama dari upaya ini adalah lulusan SMK.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Instruksi ini mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembangkan strategi guna meningkatkan kualitas lulusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DU/DI), serta dapat bersaing dalam era global dan regional, termasuk dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sebagai langkah konkret, Kemendikbud menjadikan pendidikan vokasi sebagai salah satu program prioritas. Pada tahun 2018, empat bidang keahlian utama ditetapkan sebagai prioritas pengembangan, yaitu kelautan, pariwisata, pertanian, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, upaya penguatan pendidikan vokasi juga dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penerapan model teaching factory atau techno park, peningkatan kerja sama dengan industri, serta penyesuaian kurikulum agar selaras dengan standar sertifikasi profesi.

Gambar 2.3 menunjukkan capaian dukungan program vokasi yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud hingga tahun 2019.



Gambar 2. 3 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK Tahun 2019

Sumber: Renstra Kemdikbud 2020-2024

e. Kebijakan 8+i

Sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Vokasi menetapkan kebijakan 8+i, yang mencakup:

- 1) Penyusunan kurikulum secara kolaboratif dengan dunia kerja, yang menekankan keseimbangan antara soft skills, hard skills, dan karakter kebhkerjaan sesuai dengan kebutuhan industri;
- 2) Penerapan *Project-Based Learning (PBL)* berbasis proyek nyata dari dunia kerja untuk memastikan penguatan hard skills, soft skills, serta karakter siswa;
- 3) Peningkatan jumlah serta peran guru/instruktur yang berasal dari industri atau pakar dunia kerja guna meningkatkan relevansi pembelajaran;
- 4) Pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) atau magang di industri dengan durasi minimal satu semester agar siswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja;
- 5) Sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan guru harus sesuai dengan

standar serta kebutuhan industri;

- 6) Guru didorong untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknologi melalui pelatihan secara berkala;
- 7) Pengembangan riset terapan yang mendukung model *Teaching Factory (TEFA)* berbasis studi kasus atau kebutuhan industri;
- 8) Komitmen dunia kerja dalam menyerap lulusan SMK sebagai tenaga kerja yang kompeten;
- 9) Huruf "i" dalam kebijakan ini mengacu pada berbagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia industri, seperti pemberian beasiswa dan/atau ikatan dinas, serta bantuan dalam bentuk donasi peralatan laboratorium atau fasilitas lainnya.

f. Perkembangan Kebijakan di SMK

Sejak tahun 2006, Direktorat Pendidikan SMK telah mengembangkan berbagai kebijakan guna meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Beberapa langkah strategis yang telah diterapkan antara lain:

- 1) Penetapan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada tahun 2006. Program RSBI dirancang untuk mengembangkan SMK agar memiliki standar internasional dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta manajemen sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global dengan beberapa fokus utama:
 - a) Penyelarasan kurikulum agar setara dengan standar internasional;
 - b) Pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi bertaraf internasional;
 - c) Penyediaan fasilitas belajar yang modern dan memadai guna menunjang pembelajaran berkualitas.
- 2) Tahun 2010 beberapa SMK secara nasional ditetapkan sebagai SMK *INVEST (Indonesia Vocational Education Strengthening)*. SMK

INVEST adalah program yang didanai oleh pinjaman dan hibah dari pemerintah luar negeri untuk memperkuat pendidikan vokasi di Indonesia, fokus pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Program ini melanjutkan upaya dari SMK RSBI dengan penekanan pada penguatan kualitas pendidikan vokasi secara umum. Kegiatan prioritasnya adalah:

- a) Peningkatan kompetensi teknis dan vokasional siswa;
 - b) Peningkatan kapasitas manajemen sekolah;
 - c) Pengembangan kurikulum berbasis industri.
- 3) Seluruh SMK yang termasuk kategori SMK RSBI dan SMK *INVEST* diwajibkan menerapkan sistem manajemen mutu *ISO 9001:2008* yang kemudian bermutasi ke *ISO 9001:2015*; bertujuan untuk memastikan kualitas proses pendidikan di SMK sesuai dengan standar internasional. Kaitannya dengan SMK RSBI dan SMK *INVEST* yakni memberikan kerangka kerja untuk manajemen mutu yang berkesinambungan, mendukung SMK dalam mencapai keunggulan operasional. Kegiatan prioritasnya adalah:
- a) Standarisasi proses pendidikan dan manajemen sekolah;
 - b) Audit dan sertifikasi ISO untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.
- 4) Setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan SMK RSBI, tahun 2012 beberapa SMK secara nasional pada tahun 2016 ditetapkan sebagai SMK Revitalisasi. Program revitalisasi SMK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia industri. (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016). Program ini menguatkan program-program sebelumnya dengan penekanan pada kebutuhan aktual industri. Kegiatan prioritasnya adalah:
- a) Pembaruan kurikulum sesuai kebutuhan industri;
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran vokasi;

- c) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- 5) Tahun 2017 beberapa SMK ditetapkan sebagai SMK Rujukan.
 SMK Rujukan adalah SMK yang ditetapkan sebagai model bagi sekolah-sekolah lain dalam hal kualitas pendidikan dan manajemen sekolah. Program ini memberi harapan agar sekolah yang ditetapkan sebagai SMK Rujukan menjadi contoh terbaik dalam implementasi program-program peningkatan kualitas. Kegiatan prioritasnya adalah:
- a) Menyebarluaskan praktik-praktik terbaik ke SMK lain;
 - b) Pembinaan dan pendampingan kepada SMK lain.
- 6) Tahun 2018 ditetapkannya SMK *TEFA* dengan pengertian bahwa *TEFA* adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan proses produksi nyata di lingkungan pendidikan, dimana siswa belajar melalui pengalaman praktis langsung. Program ini memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik melalui pengalaman industri langsung dengan kegiatan prioritas:
- a) Implementasi model pembelajaran berbasis proyek dan produksi;
 - b) Kolaborasi dengan industri untuk menyediakan lingkungan belajar yang nyata.
- 7) Tahun 2020 ditetapkannya SMK Pusat Keunggulan (SMK PK).
 SMK PK adalah SMK yang memiliki keunggulan dalam bidang tertentu dan ditetapkan sebagai pusat inovasi dan pengembangan keahlian vokasi. SMK ini diharapkan menjadi pusat unggulan dalam pengembangan keahlian tertentu yang relevan dengan kebutuhan industri. Prioritas kegiatannya:
- a) Pengembangan program unggulan dalam bidang tertentu.
 - b) Meningkatkan kerja sama dengan industri terkait bidang keunggulan.
- 8) Tahun 2021 ditetapkannya SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yakni SMK Negeri yang diberi otonomi pengelolaan

keuangan dan operasional seperti badan layanan umum, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan sumber daya.

Kebijakan ini memungkinkan SMK untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif dengan kegiatan prioritas:

- a) Peningkatan kemandirian pengelolaan sekolah;
- b) Optimalisasi penggunaan dana untuk peningkatan kualitas Pendidikan.

Seluruh aspek yang telah disebutkan sebelumnya memiliki keterkaitan erat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta daya saing lulusan SMK. Dari penetapan standar internasional, penguatan pendidikan vokasi, penerapan manajemen mutu, hingga program revitalisasi dan pengembangan sebagai pusat unggulan serta badan layanan umum, semuanya diarahkan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja.

Setelah memperoleh bantuan dana, fokus utama dalam pengembangan SMK meliputi:

- 1) Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri serta standar internasional;
- 2) Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan serta sertifikasi yang relevan;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran berkualitas;
- 4) Memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- 5) Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri guna meningkatkan relevansi pendidikan vokasi.

Kategori SMK yang dipilih disesuaikan dengan kemampuan dan fokus dari masing-masing SMK, baik dalam hal kurikulum internasional, penguatan vokasi, manajemen mutu, revitalisasi, rujukan, *TEFA*, pusat

keunggulan, atau BLUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Berbagai dokumen dan kebijakan terkait pengembangan SMK)

4. Daya Saing Lulusan

a. Pengertian Daya Saing

Daya saing merupakan kapasitas individu, organisasi, atau suatu negara dalam menawarkan produk atau layanan yang unggul, lebih efisien, serta lebih menarik dibandingkan dengan pesaingnya. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas, inovasi, harga, produktivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar.

Menurut *World Economic Forum* (2020) dalam *The Global Competitiveness Report*, daya saing didefinisikan sebagai "serangkaian institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara," yang meliputi inovasi, pendidikan, efisiensi pasar, dan stabilitas makroekonomi. Secara lebih spesifik, daya saing juga dapat diartikan sebagai "kemampuan suatu perusahaan atau negara dalam menciptakan nilai ekonomi lebih besar dibandingkan pesaingnya." Sementara itu, Porter (1990) menegaskan bahwa daya saing sangat bergantung pada tingkat produktivitas dan kapasitas inovasi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya saing merupakan konsep yang luas dan mencakup kemampuan individu, organisasi, serta negara dalam menghadapi persaingan dan meraih keunggulan di sektor masing-masing. Faktor-faktor seperti inovasi, efisiensi operasional, mutu, pendidikan, dan kebijakan ekonomi memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat daya saing. Berbagai lembaga dan pakar telah mengembangkan berbagai indikator untuk mengukur daya saing, yang menekankan pentingnya produktivitas, inovasi, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang terus berkembang. Secara keseluruhan, daya saing mencerminkan kemampuan untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada di pasar global, baik bagi individu, organisasi, maupun negara.

b. Daya Saing Lulusan SMK

Daya saing lulusan SMK dalam memasuki lapangan kerja adalah kemampuan lulusan untuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Daya saing ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterampilan teknis, kompetensi non-teknis (*soft skills*), relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta dukungan dari institusi pendidikan dan kebijakan pemerintah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020) dalam "Laporan Kinerja SMK" menyatakan bahwa: “1) kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri meningkatkan daya saing lulusan SMK; 2) Sertifikasi yang diakui oleh industri membantu meningkatkan kredibilitas dan peluang kerja lulusan; dan 3) Keterlibatan dalam program magang yang relevan dengan bidang keahlian meningkatkan keterampilan praktis dan kesiapan kerja lulusan”. Selain itu, keterampilan seperti komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu menjadi faktor penentu daya saing lulusan di pasar kerja. Bahkan kolaborasi antara SMK dan industri dalam pengembangan kurikulum dan program pelatihan membantu menyesuaikan keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar (Rahmawati, Y., & Hidayat, R. :2018).

Pendidikan kejuruan luar negeri juga menyepakati kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan. Terlebih magang yang berkualitas memberikan pengalaman kerja yang berharga dan meningkatkan peluang kerja lulusan. (Cedefop: 2015).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa daya saing lulusan SMK dalam memasuki lapangan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan teknis, keterampilan non-teknis, relevansi kurikulum, sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja, dan

kemampuan untuk terus belajar adalah komponen utama yang menentukan daya saing lulusan. Implementasi program-program seperti pendidikan dual, kerjasama industri, dan pelatihan berbasis kompetensi telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

c. Kendala meningkatkan Daya Saing

Upaya meningkatkan daya saing lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu keterampilan teknis, keterampilan non-teknis (*soft skills*), kurikulum, infrastruktur, kemitraan dengan industri, kebijakan pemerintah, serta persepsi masyarakat.

Dari segi keterampilan teknis, masih banyak lulusan SMK yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksesuaian antara kurikulum dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pasar kerja (Susanti, N., 2019). Selain itu, kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman kerja melalui program magang atau praktik kerja industri masih terbatas, sehingga mereka tidak mendapatkan paparan langsung terhadap dunia kerja yang sesungguhnya (Setiawan, R., 2018). Kurangnya pengalaman ini juga berdampak pada lemahnya keterampilan non-teknis (*soft skills*) seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan pemecahan masalah, yang menjadi aspek penting dalam dunia kerja (Wibowo, A., 2020).

Selain itu, kesiapan sekolah dalam mengelola kurikulum, infrastruktur, serta membangun kemitraan dengan industri juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing lulusan SMK. Kurikulum yang masih kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi menjadi salah satu hambatan

utama (Yulianto, T., 2017). Di sisi lain, banyak SMK yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, peralatan praktik, dan teknologi pendukung yang sudah tidak lagi sesuai dengan standar industri saat ini (Anwar, M., 2018). Kurangnya infrastruktur dan kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja ini diperburuk dengan minimnya kerja sama antara SMK dan industri, yang menyebabkan siswa kurang mendapatkan pengalaman langsung dengan teknologi dan proses produksi yang digunakan di dunia kerja (Nugroho, H., 2019).

Dari aspek kebijakan pemerintah dan persepsi masyarakat, terdapat beberapa kendala lain yang turut mempengaruhi daya saing lulusan SMK. Kebijakan yang sering berubah serta kurangnya kesinambungan dalam implementasi program peningkatan kualitas pendidikan vokasi menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengembangan SMK (Wahyuni, S., 2020). Selain itu, masih terdapat stigma negatif di masyarakat yang menganggap bahwa lulusan SMK memiliki prospek kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMA atau perguruan tinggi. Pandangan ini menjadi faktor yang menghambat minat masyarakat dalam memilih pendidikan kejuruan sebagai jalur yang menjanjikan untuk masa depan (Suryadi, A., 2019).

Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia industri, serta institusi pendidikan, untuk memastikan lulusan SMK memiliki daya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

d. Solusi meningkatkan Daya Saing

Meningkatkan daya saing lulusan SMK agar mampu bersaing di dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan

dalam upaya ini, antara lain pembaruan kurikulum, peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis, penguatan kemitraan dengan industri, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, modernisasi sarana pendidikan, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap pendidikan kejuruan.

Karena SMK memiliki keterkaitan erat dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA), langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama dalam penyusunan kurikulum yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar tenaga kerja. Pelibatan industri dalam proses ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Yulianto, T., 2017). Selain itu, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dapat menjadi strategi efektif yang memungkinkan siswa mengerjakan proyek nyata yang sesuai dengan kondisi industri (Thomas, J. W., 2000).

Selanjutnya, diperlukan peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berfokus pada keterampilan spesifik yang dibutuhkan industri (Susanti, N., 2019). Di samping itu, pengembangan soft skills seperti kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, serta pemecahan masalah juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja (Wibowo, A., 2020).

Kemitraan dengan IDUKA juga harus diperkuat melalui penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik guna meningkatkan kompetensi teknis dan pedagogis mereka (Rahmawati, E., 2018). Selain itu, guru didorong untuk memperoleh sertifikasi profesional dalam bidang keahlian tertentu agar kualitas pengajaran semakin meningkat (Anwar, M., 2018).

Dari segi infrastruktur dan sarana pendidikan, SMK perlu

melakukan pembaruan dan pengadaan fasilitas belajar yang memadai, seperti laboratorium, bengkel praktik, serta peralatan berbasis teknologi terbaru (Anwar, M., 2018). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran juga harus ditingkatkan guna memperkuat keterampilan digital siswa sebagai bekal menghadapi era industri 4.0 (Wahyuni, S., 2020).

Untuk merealisasikan berbagai upaya tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan pendidikan kejuruan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu merumuskan regulasi yang mendukung, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam program magang dan pelatihan bagi siswa SMK (Wahyuni, S., 2020). Selain itu, pengalokasian dana yang memadai untuk pelatihan guru, modernisasi fasilitas, serta program peningkatan kualitas lainnya menjadi faktor kunci dalam menunjang keberhasilan pendidikan vokasi (Rahmawati, E., 2018).

Aspek lain yang tak kalah penting adalah promosi dan perubahan persepsi masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Kampanye publik perlu dilakukan untuk meningkatkan citra positif SMK dan menekankan bahwa keterampilan teknis memiliki peran strategis dalam dunia kerja (Suryadi, A., 2019). Selain itu, penyediaan layanan penyuluhan karir juga dapat membantu siswa dalam memahami berbagai peluang kerja serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia industri (Thomas, J. W., 2000).

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, lulusan SMK diharapkan dapat lebih siap dan kompetitif dalam menghadapi persaingan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

e. Keberhasilan Meningkatkan Daya Saing

Keberhasilan dalam meningkatkan daya saing lulusan SMK agar mampu bersaing di dunia kerja membutuhkan strategi yang menyeluruh. Strategi tersebut mencakup penyusunan kurikulum yang selaras dengan

kebutuhan industri, pemberian pengalaman kerja nyata, kemitraan erat dengan sektor industri, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Berbagai studi kasus dari dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah merancang kurikulum yang sesuai dengan tuntutan industri sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Yulianto, T., 2017). Selanjutnya, SMK perlu mengimplementasikan program magang serta praktik kerja industri sebagai sarana bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata (Setiawan, R., 2018). Kemitraan dengan IDUKA juga harus diperkuat dengan mengembangkan program pelatihan yang menyesuaikan dengan perkembangan industri serta kebutuhan pasar tenaga kerja (Nugroho, H., 2019).

Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi faktor kunci dalam mencetak lulusan yang kompeten. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan keahlian teknis maupun pedagogis mereka (Rahmawati, E., 2018). Di sisi lain, integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran menjadi langkah penting dalam membekali siswa dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era modern (Wahyuni, S., 2020).

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, lulusan SMK diharapkan lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja serta memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

D. Landasan Kebijakan

Selain bertumpu pada landasan filsafat, sistem nilai, dan landasan teori, penelitian ini juga didorong oleh kebijakan yang relevan. Kebijakan-kebijakan

tersebut memberikan kerangka kerja yang kuat bagi manajemen SMK dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan pada SMK di KCD Wilayah VII Provinsi Jawa Barat. Adapun beberapa landasan kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan kejuruan seperti SMK. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan erat dengan kompetensi lulusan SMK antara lain:

a. Pasal 15:

Pasal ini menyatakan bahwa sistem pendidikan mencakup berbagai jenis pendidikan, termasuk pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang bertujuan utama untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja di bidang tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa SMK memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA.

b. Pasal 35:

- 1) Ayat (1): Standar nasional pendidikan meliputi berbagai aspek, seperti standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta sistem penilaian. Semua aspek ini harus dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan.
- 2) Ayat (2): Standar nasional pendidikan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pengelolaan sekolah, serta alokasi pembiayaan.

Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan SMK dirancang agar siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri.

c. Pasal 57:

- 1) Ayat (1): Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian mutu pendidikan secara nasional dan sebagai bentuk akuntabilitas institusi pendidikan kepada para pemangku kepentingan.
- 2) Ayat (2): Evaluasi mencakup penilaian terhadap peserta didik, institusi pendidikan, serta program pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Pasal ini menekankan pentingnya proses evaluasi dan akreditasi dalam memastikan bahwa institusi pendidikan, termasuk SMK, tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

d. Pasal 61 Ayat (3):

Ketentuan ini menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang dimiliki setelah melalui uji kompetensi. Uji kompetensi ini harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang.

Pasal ini menegaskan bahwa sertifikat kompetensi menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu lulusan SMK. Sertifikat ini tidak hanya menjadi bukti formal atas keterampilan dan pengetahuan lulusan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bagi dunia industri bahwa lulusan SMK memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan. Dengan adanya sertifikasi yang ketat dan terstruktur, kepercayaan IDUKA terhadap lulusan SMK dapat meningkat, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen menegaskan bahwa seorang guru harus memenuhi kualifikasi akademik, memiliki kompetensi yang memadai, memperoleh sertifikasi pendidik, serta

mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud mencakup aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi profesional, khususnya, berkaitan dengan pemahaman mendalam terhadap materi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Undang-undang ini juga menggarisbawahi peran penting guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tantangan kompetensi lulusan SMK yang masih belum optimal, undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme guru diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kompetensi lulusan SMK.

Untuk mengatasi tantangan dalam peningkatan kompetensi lulusan SMK, beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru SMK guna memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini yang selaras dengan perkembangan industri.
- b. Membangun kerja sama antara SMK dan IDUKA untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja serta menyediakan kesempatan magang bagi siswa.
- c. Mengembangkan soft skills siswa, seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan, yang menjadi aspek penting dalam dunia kerja selain keterampilan teknis.
- d. Mendorong siswa untuk mengikuti program sertifikasi yang diakui oleh industri, sehingga mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam dunia kerja.
- e. Menanamkan nilai-nilai disiplin, etika kerja, dan tanggung jawab melalui program penguatan pendidikan karakter di lingkungan SMK.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara sistematis, diharapkan kompetensi lulusan SMK dapat ditingkatkan sehingga lebih

sesuai dengan kebutuhan industri, serta mampu mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, mengatur tentang pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan di SMK. Peraturan ini menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pendidikan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam menghadapi permasalahan rendahnya kompetensi lulusan SMK - yang berdampak pada menurunnya kepercayaan IDUKA serta meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK - peraturan ini memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK. Salah satu solusi utama yang ditekankan adalah penguatan kemitraan antara SMK dengan IDUKA. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran di SMK selaras dengan kebutuhan serta perkembangan dunia industri, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap memasuki dunia kerja.

Selain itu, peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SMK. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan serta pengembangan profesional yang berkelanjutan, sehingga guru mampu mengajar sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh IDUKA.

Penerapan manajemen berbasis mutu di SMK juga menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan dalam peraturan ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu, SMK dapat meningkatkan efisiensi operasional serta efektivitas dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing lulusan di dunia

kerja.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai pedoman utama dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Beberapa aspek krusial yang berkaitan dengan kompetensi lulusan SMK dalam delapan standar yang ditetapkan meliputi:

a. Standar Kompetensi Lulusan (Pasal 4 hingga Pasal 6)

Standar ini menetapkan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh lulusan SMK memiliki kompetensi yang relevan serta dapat diterapkan secara langsung dalam dunia kerja.

b. Standar Isi (Pasal 7 hingga Pasal 9)

Standar ini mengatur materi serta kompetensi yang harus dikuasai peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Implementasinya dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, serta menerapkan model pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan kasus nyata dari dunia industri.

c. Standar Proses (Pasal 10 hingga Pasal 15)

Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam proses pembelajaran. Penerapan standar proses yang efektif akan menjamin keberlangsungan pendidikan yang efisien di SMK, sehingga mampu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan industri.

d. Standar Penilaian Pendidikan (Pasal 16 hingga Pasal 19)

Standar ini mengatur prosedur, instrumen, serta mekanisme

penilaian terhadap hasil belajar siswa. Penilaian yang berbasis kompetensi dan dilakukan secara objektif akan memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang terukur dan diakui oleh dunia industri.

e. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** (Pasal 20 hingga Pasal 24)

Standar ini menentukan kualifikasi serta kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional sangat berperan dalam menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan di dunia kerja.

f. **Standar Sarana dan Prasarana** (Pasal 25 hingga Pasal 26)

Standar ini mengatur penyediaan, kualitas, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas yang memadai serta selaras dengan kebutuhan industri akan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan tuntutan dunia kerja.

g. **Standar Pengelolaan** (Pasal 27 hingga Pasal 31)

Standar ini berfokus pada manajemen sekolah yang harus dijalankan secara profesional melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Implementasi standar ini melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan peningkatan kualitas sekolah dan lulusannya.

h. **Standar Pembiayaan** (Pasal 32 hingga Pasal 33)

Standar ini menentukan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Implementasinya dilakukan dengan memastikan ketersediaan dana yang memadai, baik dari pemerintah maupun sumber lainnya, serta mengelola keuangan pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Dengan penerapan delapan standar nasional pendidikan ini, diharapkan lulusan SMK memiliki kompetensi yang unggul, sesuai dengan

tuntutan industri, serta mampu bersaing di dunia kerja.

5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Revitalisasi SMK

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Revitalisasi SMK bertujuan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan SMK melalui berbagai strategi yang terencana. Instruksi ini memberikan arahan serta langkah konkret dalam menangani permasalahan kompetensi lulusan SMK yang sering kali menjadi perhatian bagi IDUKA.

Terdapat sepuluh strategi utama dalam revitalisasi SMK, yaitu:

- a. Penguatan sumber daya manusia;
 - b. Pengembangan Sistem Administrasi Sekolah (SAS) berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - c. Penyesuaian program pendidikan dengan dunia industri (*link and match*);
 - d. Kurikulum yang berbasis kebutuhan industri;
 - e. Pengembangan *Teaching Factory (TEFA)*;
 - f. Pemanfaatan media pembelajaran berupa video tutorial serta portofolio berbasis video *e-Report Skill*;
 - g. Pelaksanaan uji sertifikasi profesi;
 - h. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - i. Pengembangan kearifan lokal dalam pembelajaran;
 - j. Menjadikan SMK sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
- (Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud, 2017)

Sebagai tindak lanjut dari sepuluh strategi tersebut, Direktorat Pembinaan SMK menetapkan lima area utama dalam implementasi revitalisasi, yaitu: (1) peningkatan kerja sama dengan IDUKA, (2) penyelarasan kurikulum, (3) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, (4) pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan, serta (5) penguatan sistem sertifikasi dan akreditasi (Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud, 2017).

Berbagai kajian ilmiah telah dilakukan untuk mendukung implementasi revitalisasi SMK dalam lima aspek utama tersebut. Berikut adalah rincian dari setiap aspek revitalisasi, sebagai berikut:

- a. Penguatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri.

Kolaborasi yang erat antara SMK dan IDUKA sangat penting untuk

memastikan kurikulum serta pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kemitraan ini, SMK dapat menyesuaikan kurikulum, menyediakan program magang bagi siswa, serta mengembangkan pelatihan kerja yang relevan sehingga lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia industri.

b. Reformasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran.

Agar lulusan SMK siap menghadapi dunia kerja, kurikulum harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi perlu melibatkan dunia usaha dan industri dalam proses penyusunannya. Selain itu, metode pembelajaran inovatif berbasis proyek atau praktik langsung harus diterapkan untuk meningkatkan keterampilan siswa.

c. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.

Keberhasilan pendidikan vokasi sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, guru dan tenaga kependidikan harus mendapatkan pelatihan serta sertifikasi secara berkala agar selalu mengikuti perkembangan industri dan teknologi. Program peningkatan kompetensi ini akan memastikan bahwa pengajaran di SMK tetap relevan dan berkualitas.

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Fasilitas pendidikan yang lengkap dan sesuai dengan standar industri berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dengan tersedianya peralatan dan infrastruktur yang memadai, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis mereka secara optimal. Oleh sebab itu, investasi dalam pengadaan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam revitalisasi SMK.

e. Sistem Sertifikasi dan Uji Kompetensi.

Sertifikasi kompetensi memberikan pengakuan resmi terhadap keterampilan lulusan SMK, sehingga mereka lebih mudah diterima di dunia kerja. Uji kompetensi yang terstandarisasi perlu ditingkatkan agar

lulusan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat standar serta kualitas sertifikasi guna meningkatkan daya saing lulusan di pasar tenaga kerja.

Dengan penerapan strategi revitalisasi yang komprehensif, diharapkan SMK mampu mencetak lulusan yang memiliki keterampilan tinggi, berdaya saing global, serta siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Untuk mempercepat peningkatan mutu SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan kebijakan 8+i, yang mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Kurikulum dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan dunia kerja, dengan penekanan pada penguatan *soft skills*, *hard skills*, serta karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- b. Pembelajaran diorientasikan pada proyek nyata dari dunia kerja (*Project-Based Learning/PBL*) guna memastikan peserta didik memiliki keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan karakter yang kuat.
- c. Ditingkatkan jumlah serta peran guru/instruktur yang berasal dari industri maupun tenaga ahli profesional agar pembelajaran lebih relevan dengan dunia kerja.
- d. Program praktik kerja lapangan (PKL) diwajibkan berlangsung minimal selama satu semester guna memberikan pengalaman kerja yang lebih mendalam bagi siswa.
- e. Sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan guru harus disesuaikan dengan standar serta kebutuhan dunia industri agar dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja.
- f. Guru didorong untuk secara rutin mengikuti pelatihan guna memperbarui keterampilan serta menguasai perkembangan teknologi terbaru.
- g. Didorong pelaksanaan riset terapan yang mendukung *Teaching Factory (TEFA)*, berbasis studi kasus atau kebutuhan nyata dari dunia industri.

- h. Dunia usaha dan industri diharapkan memiliki komitmen untuk menyerap lulusan SMK sebagai tenaga kerja.
- i. Huruf “i” melambangkan berbagai bentuk potensi kerja sama yang dapat dibangun dengan dunia industri, termasuk program beasiswa dan/atau ikatan dinas, serta kontribusi dalam bentuk donasi seperti peralatan laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya (Kemdikbud, 2021).

Dengan kebijakan 8+i ini, diharapkan SMK dapat semakin selaras dengan kebutuhan industri serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter kuat, dan siap bersaing di dunia kerja.

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2019, Tentang Revitalisasi SMK

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2019 mengenai Revitalisasi SMK memberikan arah kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas serta daya saing lulusan SMK di Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan terkait kompetensi lulusan yang masih perlu ditingkatkan serta memperkuat kepercayaan IDUKA terhadap lulusan SMK.

Dalam peraturan ini, terdapat enam aspek utama yang menjadi fokus revitalisasi, yaitu: pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas lulusan melalui sertifikasi kompetensi, penguatan kemitraan dengan IDUKA, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

a. Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Kurikulum SMK perlu disesuaikan dengan tuntutan industri dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk merancang kurikulum berbasis kompetensi yang berfokus pada keterampilan praktis dan teknis guna meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

b. Peningkatan Kompetensi Guru

Kompetensi tenaga pendidik harus selalu diperbarui agar selaras dengan perkembangan industri dan teknologi terkini. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan sertifikasi bagi guru, serta program magang di industri untuk meningkatkan pengalaman praktis mereka dalam bidang keahlian masing-masing.

c. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan harus memenuhi standar industri agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Untuk itu, diperlukan alokasi anggaran guna pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk penyediaan laboratorium dan ruang praktik yang modern serta dilengkapi dengan peralatan yang mendukung proses pembelajaran.

d. Peningkatan Kualitas Lulusan Melalui Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesiapan lulusan SMK memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, siswa diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi resmi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pengakuan sertifikasi ini di dunia industri sehingga dapat menjadi salah satu syarat utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

e. Penguatan Kerjasama dengan IDUKA.

Kerja sama yang erat antara SMK dan IDUKA sangat penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, SMK perlu memperluas program magang dan kerja praktik bagi siswa, serta melibatkan dunia industri dalam proses pengembangan kurikulum dan program pembelajaran.

f. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. SMK perlu mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning dan blended learning, serta memastikan tersedianya akses internet yang memadai bagi

peserta didik dan tenaga pendidik.

Dengan diterapkannya kebijakan revitalisasi ini, diharapkan lulusan SMK di Jawa Barat memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi daerah.

8. SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)

SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) merupakan inisiatif pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki kompetensi keahlian tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas serta kinerja sekolah. Program ini diperkuat melalui kemitraan yang erat serta penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), dengan harapan dapat menjadi model atau rujukan bagi SMK lain. SMK PK diharapkan berperan sebagai sekolah penggerak yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi secara keseluruhan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, SMK PK didefinisikan sebagai SMK yang mampu mencetak lulusan dengan kompetensi unggul dalam bidang keahlian tertentu sehingga dapat terserap di DUDIKA atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini diwujudkan melalui program penyelarasan pendidikan vokasi yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh dengan dunia industri, dunia usaha, serta dunia kerja. Selain itu, SMK PK juga berfungsi sebagai pusat keunggulan dan peningkatan kualitas yang dapat menjadi rujukan bagi sekolah kejuruan lainnya.

Secara umum, program SMK PK bertujuan untuk mencetak lulusan yang memiliki daya saing tinggi, baik untuk langsung memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dan berbasis praktik kerja yang mendalam. Selain itu, SMK PK diharapkan

dapat menjadi pusat pengembangan kualitas serta model pembelajaran bagi SMK lainnya. Secara lebih spesifik, program SMK PK memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: (1) Memperkuat sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pemerintah daerah dalam implementasi dan pendampingan program; (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMK, yang mencakup kepala sekolah, pengawas, guru, teknisi, serta tenaga administrasi agar mampu menjalankan manajemen serta pembelajaran berbasis dunia kerja; (3) Mengembangkan kompetensi peserta didik, baik dalam aspek keterampilan teknis (*hard skills*) maupun keterampilan nonteknis (*soft skills*), yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja serta memperkuat karakter berbasis nilai-nilai Pancasila; (4) Menerapkan manajemen berbasis data untuk mendukung perencanaan yang lebih efektif di lingkungan sekolah; (5) Meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses administratif sekolah melalui pemanfaatan platform digital; (6) Memperbaiki serta meningkatkan sarana dan prasarana praktik belajar yang memenuhi standar dunia industri; serta (7) Memperkuat kemitraan antara Kemendikbudristek dengan dunia kerja dalam rangka pengembangan serta pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan.

Melalui berbagai upaya ini, SMK PK diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja, tetapi juga berperan sebagai pusat pengembangan bagi sekolah kejuruan lainnya dalam rangka membangun sistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri.

9. SMK Badan Layanan Umum Daerah (SMK BLUD)

SMK Badan Layanan Umum Daerah (SMK BLUD) adalah SMK Negeri yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan operasional dengan fleksibilitas seperti Badan Layanan Umum. Mekanisme ini memungkinkan sekolah untuk lebih leluasa dalam mengelola sumber daya serta pendanaan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dasar hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMD.INVESADBANG/2022, yang diterbitkan pada 25 Februari 2022, telah ditetapkan penerapan status BLUD bagi 35 SMK Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan kebijakan ini, SMK diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan kemandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana demi meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan bagi peserta didik.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain keempat landasan tersebut, supaya penelitian tentang Manajemen SMK Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Lulusan, (Studi Kasus Pada SMK di KCD Wilayah VII Provinsi Jawa Barat) ini pembahasannya lebih terarah dan mendalam, penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
1	Lamijan, dkk, (2024), Implementasi Program IDUKA (Link and Match) di Sekolah Menengah Kejuruan.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Lamijan, dkk. (2024) menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan model <i>CIPP (Context, Input, Process, Product)</i> , yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu program berdasarkan konteks, masukan,	1. Sama-sama membahas program kerja sama antara SMK dan IDUKA. 2. Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pemilihan	Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Program IDUKA (<i>Link and Match</i>) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sekolah, memperkuat kompetensi siswa,

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
		proses, dan hasilnya secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang lebih menitikberatkan pada eksplorasi mendalam mengenai pengalaman dan persepsi. 2. Fokus utama penelitian Lamijan, dkk. (2024) adalah evaluasi pelaksanaan Program IDUKA di SMK, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program tersebut. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek manajemen SMK dengan menggunakan pendekatan <i>PDCA (Plan, Do, Check, Act)</i> sebagai kerangka kerja utama.	sampel penelitian.	serta memastikan kesesuaian antara materi pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, kebijakan sekolah dalam menerapkan program ini dinilai sebagai langkah yang tepat. Penelitian ini akan lebih mendalam dalam mengkaji urgensi penerapan Program IDUKA (<i>Link and Match</i>) di SMK serta dampaknya terhadap manajemen sekolah dan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.
2	Feronika Munthe & Yulius Mataputun (2021), Analisis kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Feronika Munthe & Yulius Mataputun (2021) hanya berfokus pada analisis kerja sama antara sekolah dan IDUKA dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu membahas manajemen SMK dalam meningkatkan daya saing lulusan melalui penerapan siklus <i>PDCA (Plan-Do-Check-Act)</i> sebagai strategi perbaikan berkelanjutan. 2. Penelitian Feronika Munthe & Yulius Mataputun (2021) mendalami fenomena atau kondisi spesifik yang	1. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berhubungan dengan kerja sama antara SMK dan IDUKA. 2. Menerapkan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pemilihan sampel penelitian.	Kedua penelitian memiliki keterkaitan dalam hal kerja sama dengan IDUKA, terutama dalam aspek berikut: 1. Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, 2. Implementasi kurikulum berbasis IDUKA, 3. Keterlibatan guru tamu dari industri, 4. Penyesuaian sarana dan prasarana sekolah agar

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
		terjadi pada satu SMK, sedangkan penelitian ini mengkaji dua SMK untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.		sesuai dengan standar industri, 5. Pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi siswa, dan 6. Tingkat penyerapan lulusan oleh dunia kerja.
3	Tetty Setiawaty & Ichsan Fahmi (2022), Mengurangi Kesenjangan Keterampilan Lulusan SMK: Bagaimana Cara Membangun Jaringan Kerjasama Antara SMK dan Industri dalam Berbagai Pengetahuan, Keterampilan dan Informasi.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Tetty Setiawaty & Ichsan Fahmi (2022) berfokus pada membangun jejaring kerja sama sekolah dengan berbagai pihak, sementara penelitian ini tidak hanya sekedar membangun jejaring, tetapi juga mengkaji secara lebih luas aspek manajemen dalam penguatan kerja sama tersebut. 2. Penelitian Tetty Setiawaty & Ichsan Fahmi (2022) menggunakan metode <i>critical review</i>, yaitu dengan mengulas berbagai jurnal penelitian dan sumber lain, kemudian mengaitkannya dengan asumsi serta pemikiran peneliti. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi mendalam terhadap fenomena atau kondisi tertentu yang terjadi di dua SMK sebagai objek penelitian.	1. Sama-sama membahas program kerja sama, khususnya antara sekolah dan IDUKA. 2. Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pemilihan responden atau sampel penelitian.	Penelitian sebelumnya membahas beberapa aspek penting yang juga relevan dalam penelitian ini, antara lain: 1. Pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan IDUKA, 2. Implementasi <i>Teaching Factory (TEFA)</i> berbasis teknologi terkini, 3. Membangun jaringan komunikasi yang berkelanjutan dengan alumni, 4. Pemanfaatan media video tutorial dan portofolio sebagai sarana pembelajaran, serta 5. Pengembangan SMK melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
4	Andi Garnadi, Helmawati, Ricky Yoseptry (2022),	1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Garnadi, Helmawati, dan Ricky Yoseptry (2022) secara	1. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang	Penelitian sebelumnya membahas tentang pembangunan kerja

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
	Manajemen Kelas Industri dan Industri Dunia Kerja (IDUKA) dalam Meningkatkan Kompetensi Siswa (Studi Kasus di SMK Wiraswasta dan SMK PGRI 3 Kota Cimahi).	khusus meneliti kelas industri di SMK, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelas industri di SMK. 2. Penelitian Andi Garnadi, Helmawati, dan Ricky Yoseptry (2022) berfokus pada fungsi dasar manajemen <i>POAC</i> (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>), sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>) melalui penerapan teori manajemen <i>PDCA</i> (<i>Plan, Do, Check, Act</i>).	berkaitan dengan manajemen SMK. 2. Menerapkan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pemilihan responden atau sampel penelitian.	sama dan kemitraan dengan IDUKA yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti: 1. Sinkronisasi kurikulum antara SMK dan IDUKA, 2. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum hasil sinkronisasi, 3. Program magang guru untuk meningkatkan kompetensi pendidik, 4. Kegiatan guru tamu dari industri, 5. Pengujian keterampilan siswa berbasis standar industri, serta 6. Strategi pemasaran lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja Temuan dari penelitian terdahulu ini menjadi referensi penting dalam penelitian ini, terutama dalam menganalisis efektivitas kerja sama SMK dengan IDUKA dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan.
5	Awaluddin Rahman, Dr. Amiruddin, S.T., M.T,	1. Penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin Rahman, Dr. Amiruddin, S.T., M.T., dan Nurlaela	1. Sama-sama membahas implementasi program kerja	Penelitian ini juga akan menyoroti Praktik Kerja Lapangan (PKL)

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
	Nurlaela Latief, M.P (2020), Pengaruh Praktik Kerja Lapangan Terhadap Kesiapan Kerja di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Siswa Kelas XII SMK Negeri 3 Makassar.	Latief, M.P. (2020) menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus utama pada eksplorasi pengalaman dan persepsi. 2. Penelitian Awaluddin Rahman, Dr. Amiruddin, S.T., M.T., dan Nurlaela Latief, M.P. (2020) melibatkan seluruh siswa kelas XII sebagai responden, sementara penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Alumni, IDUKA, dan Komite Sekolah sebagai sumber data.	sama dengan IDUKA. 2. Berhubungan dengan kesiapan kerja lulusan SMK.	sebagai salah satu aspek utama dalam kerja sama antara SMK dan IDUKA, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi siswa serta kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja.
6	Dendi Agustian, et al. (2024), Tantangan Pendidikan Vokasional dalam Meningkatkan Penyerapan Lulusan SMK di Dunia Industri.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Dendi Agustian, dkk. menggunakan metode <i>Systematic Literature Review (SLR)</i> untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. 2. Penelitian Dendi Agustian, dkk. mengumpulkan data dari berbagai SMK di berbagai daerah di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada dua SMK Negeri di Jawa Barat sebagai lokus penelitian	Penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi tantangan utama dalam pendidikan vokasional yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing lulusan SMK.	Penelitian ini juga berupaya untuk menggali tantangan yang dihadapi pendidikan vokasional serta mengkaji solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan daya saing lulusan SMK di dunia industri.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
7	Ai Asiah (2021), Manajemen Kemitraan SMK Dengan Dunia Usaha dan Industri Untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan SMK.	1. Penelitian Ai Asiah menggunakan teori manajemen <i>POAC</i> (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>), sedangkan penelitian ini menerapkan teori manajemen kualitas total (<i>Total Quality Management – TQM</i>) dengan siklus <i>PDCA</i> (<i>Plan, Do, Check, Act</i>). 2. Penelitian Ai Asiah dilakukan pada satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian ini melibatkan dua SMK Negeri di wilayah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 7, yaitu SMK Negeri 9 Kota Bandung dan SMK Negeri 1 Kota Cimahi.	1. Sama-sama dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya angka pengangguran lulusan SMK, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri (IDUKA). 2. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam analisisnya. 3.	Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kemitraan antara SMK dan IDUKA sebagai aspek krusial dalam meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri.
8	Rully Permata (2024), Model Total Quality Management Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Untuk Meningkatkan Keterserapan Mutu Lulusan Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI).	1. Penelitian Ruli Permana mengadopsi pendekatan Trilogi Juran, yang mencakup <i>Quality Planning</i> (Perencanaan Kualitas), <i>Quality Control</i> (Pengendalian Kualitas), dan <i>Quality Improvement</i> (Perbaikan Kualitas). Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori manajemen kualitas total (<i>Total Quality Management – TQM</i>) dengan siklus <i>PDCA</i> (<i>Plan, Do, Check, Act</i>). 2. Penelitian Ruli Permana melibatkan responden dari kalangan Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa, sedangkan penelitian ini melibatkan responden yang lebih luas, mencakup Kepala	1. Sama-sama berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan IDUKA. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam analisisnya.	Pendekatan Trilogi Juran, yang terdiri dari <i>Quality Planning</i> , <i>Quality Control</i> , dan <i>Quality Improvement</i> , dapat menjadi pendukung dalam penerapan teori manajemen kualitas total (<i>Total Quality Management – TQM</i>) dengan siklus <i>PDCA</i> dalam penelitian ini.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
		Sekolah, Guru, Siswa, Alumni, Wakil Kepala Sekolah, IDUKA, dan Komite Sekolah.		
9	Azizah et.al. (2015). Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DU/DI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan pada Smk Negeri 3 Banda Aceh.	1. Penelitian Azizah et al. bertujuan hanya untuk mengidentifikasi kemampuan kepala sekolah dalam membangun kerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) guna meningkatkan kompetensi lulusan. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas. 2. Penelitian Azizah et al. melibatkan responden dari kalangan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat (Waka Humas), dan Guru Pembimbing. Sebaliknya, penelitian ini melibatkan beragam responden, yaitu Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Alumni, Wakil Kepala Sekolah, IDUKA, dan Komite Sekolah.	1. Berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya lulusan SMK yang belum terserap di dunia kerja akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri di wilayah setempat. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam proses analisisnya.	Fokus pada kerja sama dengan IDUKA menjadi aspek utama dalam penelitian ini, terutama terkait dengan isi perjanjian kerja sama (MoU) yang dibuat.
10	Bramantiya, A.W et.al (2024). Eksplorasi Daya Saing Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan Kelas Industri PT. INKA Melalui Sertifikasi Welder (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Bendo).	1. Penelitian Bramantiya, A.W et al. (2024) bertujuan untuk menganalisis daya saing lulusan SMK yang tergabung dalam kelas industri pada IDUKA tertentu, sedangkan penelitian ini mencakup seluruh program keahlian yang ada di sekolah. 2. Penelitian Bramantiya, A.W et al. menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada satu SMK, sedangkan penelitian ini menggunakan	1. Sama-sama menyoroti kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, yang menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK. 2. Berfokus pada kemitraan sekolah dengan IDUKA dalam	<i>MoU</i> dengan IDUKA yang mencakup penyaluran kurikulum, program guru tamu, serta sertifikasi peserta didik menjadi salah satu aspek penting yang dikaji dalam penelitian ini.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
		pendekatan deskriptif kualitatif dengan cakupan dua SMK sebagai lokus penelitian.	meningkatkan kualitas lulusan.	
11	Zelika MS et.al (2024). Implementasi Kurikulum Pusat Keunggulan Melalui Program Magang Industri di SMK 1 Cikarang Selatan	Penelitian Zelika MS et al. (2024) bertujuan menggali implementasi Kurikulum Pusat Keunggulan melalui Program Magang Industri, dengan lokasi penelitian di daerah yang memiliki banyak perusahaan terkemuka, khususnya di wilayah Cikarang Selatan dan sekitarnya. Sementara itu, salah satu lokus dalam penelitian ini, yaitu SMK Negeri 1 Cimahi, memiliki institusi pasangan yang mayoritas berada di luar kota Cimahi.	1. Sama-sama menyoroti bentuk kerja sama antara sekolah dengan IDUKA. 2. Berfokus pada penerapan manajemen serta metode pembelajaran yang berbasis dunia industri.	1. Kerjasama dengan IDUKA dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum berbasis industri menjadi aspek utama yang dikaji dalam penelitian ini. 2. Penyempurnaan dan optimalisasi kurikulum agar tetap selaras dengan perkembangan industri terkini dilakukan berdasarkan masukan dari dunia industri serta umpan balik dari siswa dan lulusan, yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini.
12	Reinaldo Antonio et.al (2024). Pengaruh Implementasi Kurikulum Berbasis Iduka Terhadap Peningkatan Kompetensi Siswa di SMKN 5 Sijunjung	1. Penelitian Reinaldo Antonio et al. (2024) bertujuan untuk memaparkan aspek-aspek dalam konteks Program Kurikulum berbasis IDUKA, yang mencakup (a) kualitas kompetensi siswa, (b) kebijakan serta tujuan program tersebut, dan (c) kesiapan dalam pengelolaannya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada deskripsi, analisis, serta kajian mengenai Manajemen SMK dalam meningkatkan daya saing	1. Sama-sama dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya jumlah lulusan SMK yang belum terserap oleh dunia kerja akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan IDUKA.	Penerapan Program Kurikulum berbasis IDUKA di sekolah guna menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia industri menjadi aspek utama yang dikaji dalam penelitian ini.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini	Persamaan dengan Penelitian ini	Keterkaitan dengan Penelitian ini
		lulusan, dengan menggunakan pendekatan <i>PDCA</i> (<i>Plan, Do, Check, Act</i>). 2. Penelitian Reinaldo Antonio et al. (2024) menerapkan pendekatan deskriptif evaluatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	2. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru produktif, pihak IDUKA, dan siswa. 3.	

Sumber: Berbagai Sumber diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pendekatan metodologi serta fokus kajian. **Pertama**, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi pengalaman serta persepsi berbagai pemangku kepentingan, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang lebih bervariasi, seperti metode kuantitatif, evaluasi model *CIPP*, tinjauan kritis (*critical review*), serta *Systematic Literature Review*. **Kedua**, penelitian ini berfokus pada implementasi siklus *PDCA* (*Plan-Do-Check-Act*) sebagai strategi perbaikan berkelanjutan dalam manajemen SMK, sedangkan penelitian lainnya lebih banyak menyoroti evaluasi program IDUKA, penerapan *POAC*, serta analisis jejaring kerjasama. **Ketiga**, penelitian ini melibatkan dua SMK sebagai lokus penelitian, berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang hanya menganalisis satu sekolah atau melakukan pendataan dari berbagai SMK di Indonesia.

Meskipun terdapat sejumlah perbedaan, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. **Pertama**, semua penelitian sama-sama membahas hubungan erat antara SMK dan IDUKA, baik dalam bentuk evaluasi pelaksanaan program, analisis kemitraan, maupun dampaknya terhadap kesiapan

kerja lulusan. **Kedua**, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menerapkan *purposive sampling* dalam pemilihan informan. **Ketiga**, fokus utama dalam berbagai penelitian ini adalah peningkatan daya saing lulusan SMK dalam menghadapi tantangan dunia kerja, baik dari sudut pandang implementasi kebijakan, efektivitas program kemitraan, maupun optimalisasi sistem manajemen pendidikan vokasional. Temuan dari penelitian ini serta penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daya saing lulusan SMK sangat bergantung pada efektivitas manajemen sekolah dan sinergi dengan IDUKA. Studi-studi terdahulu juga telah membuktikan bahwa implementasi Program IDUKA (*Link and Match*) dapat meningkatkan mutu pendidikan serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

Dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan dan kesamaan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan studi sebelumnya. **Pertama**, penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisipliner dalam memahami manajemen SMK dengan mengombinasikan teori manajemen pendidikan, pendekatan ekologi pendidikan, serta model kemitraan industri. **Kedua**, penelitian ini memberikan analisis yang lebih menyeluruh terhadap faktor daya saing lulusan, tidak hanya dari sisi kompetensi teknis, tetapi juga keterampilan digital, kewirausahaan, serta kesiapan menghadapi tantangan industri 4.0. **Ketiga**, penerapan metode mixed methods memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif secara terpisah. **Keempat**, penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka dalam pengelolaan SMK, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pendidikan vokasional. Kelima, cakupan studi yang lebih luas di beberapa SMK yang berada di KCD Wilayah VII Provinsi Jawa Barat memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dalam implementasi strategi manajemen sekolah berdasarkan karakteristik wilayah serta industri setempat.

Dengan keunggulan-keunggulan ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam kajian akademik serta memberikan kontribusi nyata bagi

pengembangan sistem manajemen pendidikan kejuruan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan kebijakan serta praktik pendidikan vokasional di Indonesia.